

Indonesia Menjelang AFTA 2002

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wilayah perdagangan bebas yang meliputi seluruh negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya AFTA ini maka mulai tahun 2002 putaran pertama pembebasan perdagangan barang untuk 15 kelompok produksi negara-negara ASEAN (antara lain tekstil, farmasi, barang kimia, semen, pupuk, plastik perhiasan, elektronika, perabot dari kayu dan rotan, kulit, pulp, dan produk karet) akan dilaksanakan. Hal ini berarti barang-barang tersebut diatas yang berasal dari negara-negara ASEAN akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tariff 0-5% dan tidak boleh ada lagi hambatan non tariff normal. AFTA ini disepakati pada waktu KTT-IV ASEAN tanggal 27-28 Januari di Singapura. Melalui adanya perdagangan bebas di kawasan ASEAN ini, diharapkan volume perdagangan di wilayah ASEAN akan meningkat pesat sehingga memberi kemakmuran bagi masing-masing anggotanya.

Untuk mencapai terwujudnya AFTA (kawasan perdagangan bebas ASEAN) ini, maka AFTA mengimplementasikan dalam skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu program penurunan tariff yang berlaku sejak tahun 1993 sampai tahun 2002, dimana pada tahun 2002 tersebut tariff maksimal yang ditetapkan adalah 0-5%. Meskipun demikian, skema AFTA ini tetap memberi kelonggaran bagi tiap anggotanya untuk mengeluarkan produknya yang termasuk *Highly Sensitive* dari skema ini. Untuk Indonesia, produk-produk yang termasuk kategori *highly sensitive* ini antara lain meliputi berbagai

Dr. Sri Adiningsih, M. Sc.

Dosen FE UGM
Yogyakarta

produk pertanian yang belum diproses (*Unprocessed Agricultural Product-UAP*), misalnya beras, gula, produk daging, bawang putih, apel, dan cengkeh. Sejauh ini memang yang belum masuk dalam skema CEPT-AFTA hanya beberapa produk pertanian (UAP) di masing-masing negara khususnya di 6 negara ASEAN.

AFTA membawa konsekuensi bahwa kawasan perdagangan ASEAN akan dibuka secara bebas untuk anggota ASEAN dimana semua bentuk proteksi perdagangan akan dihapuskan secara gradual. Dalam hal ini Indonesia akan mendapat banyak manfaat dalam perdagangan bebas ASEAN ini apabila komoditi perdagangan Indonesia mempunyai daya saing dan efisiensi yang relatif lebih tinggi daripada mitra dagangnya di ASEAN.

menunjukkan bahwa bagi negara-negara anggota ASEAN sendiri, kawasan ASEAN bukanlah wilayah tujuan dagang yang utama.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa Singapura dan Malaysia menyumbang porsi paling besar dalam aktivitas perdagangan intra ASEAN. Aktivitas perdagangan Singapura dan Malaysia yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa kedua negara tersebutlah yang kemungkinan besar memperoleh manfaat terbesar dengan berlakunya AFTA ini.

Untuk Indonesia sendiri, share transaksi perdagangannya di intra regional ASEAN hanyalah dari 2.5% untuk ekspor dan 1.8% untuk impor. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat pada dasarnya mitra dagang utama Indonesia di wilayah ASEAN hanyalah Singapura.

Tabel 2
Exports and Imports of ASEAN Countries by Region

Origin Share	Year	Exports to ASEAN 10%	Imports to ASEAN 10%
Total ASEAN 10	1990	20.1	16.2
	2000	23.7	24.5
Share Indonesia	1990	1.8	1.2
	2000	2.5	1.8
Share Malaysia	1990	6.0	3.5
	2000	6.1	5.4
Share Philipines	1990	0.4	0.8
	2000	1.3	1.5
Share Singapore	1990	9.4	7.6
	2000	9.7	10.9
Share Thailand	1990	1.9	2.7
	2000	3.1	3.5

Sumber: World Trade Organization

Tabel 1

Share Perdagangan Intra Regional Terhadap Total Perdagangan, 2000
(Billion Dollars)

No.	Kawasan	Nilai Perdagangan Intra Regional	Total Nilai Perdagangan	Share (%)
1	Eropa Barat	1654	2441	67,7
2	Amerika Utara	421	1058	39,79
3	Eropa Timur	72	271	26,56
4	ASEAN	101,3	427	23,69

Sumber: World Trade Organization

PROFIL PERDAGANGAN KAWASAN ASEAN

Pada dasarnya nilai perdagangan antar negara di kawasan ASEAN relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan intra regional lainnya di dunia. Dari tabel 1 berikut dapat kita ketahui bahwa nilai perdagangan intra regional ASEAN relatif lebih kecil dibandingkan kawasan perdagangan lainnya di dunia. Perdagangan intra regional ASEAN hanya mencapai 23,69% dari total nilai perdagangan negara-negara ASEAN yang senilai 427 Billion USD. Hal ini

Meskipun nilai perdagangan intra regional ASEAN masih kecil, hal ini bukan berarti bahwa kita harus mengabaikan begitu saja perdagangan bebas ASEAN ini. Perdagangan bebas ASEAN ini tetap penting keberadaannya sebagai bagian dari strategi untuk tetap membuat wilayah ASEAN menarik bagi kegiatan investasi.

INDONESIA MENJELANG AFTA 2002

Salah satu yang selama ini sering dianggap membuat konsep perdagangan bebas kawasan ASEAN adalah cukup aman bagi masing-masing anggotanya

adalah karena dalam skema AFTA terdapat perjanjian perlindungan bagi komoditi yang dianggap *highly sensitive* bagi masing-masing anggotanya. Jenis produk yang termasuk kategori *Sensitive List* adalah *Unprocessed Agricultural Products*, misalnya beras, gula, bawang putih dan cengkeh. Ketentuan *highly sensitive product* ini yang dilatarbelakangi karena pada dasarnya setiap negara mempunyai jenis komoditi tertentu yang apabila dibebaskan menurut skenario pasar bebas akan berdampak besar pada perekonomian negara tersebut serta berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Untuk *Sensitive List* ini, skema AFTA memberikan toleransi kepada negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) untuk tetap melaksanakan hambatan tarif bagi aktivitas ekspor-impornya sampai dengan tahun 2013, Laos dan Myanmar pada tahun 2015, serta Cambodia pada tahun 2017.

Namun demikian, adanya produk *highly sensitive* yang kemudian dimasukkan dalam kategori *Sensitive List* dalam skema AFTA ini bukan berarti masalah besar di seputar pelaksanaan AFTA dianggap selesai sampai tingkat ini. Adanya *sensitive list* ini lah yang harus kita perhatikan! Adanya toleransi sampai dengan batas waktu 2010 (untuk ASEAN-6) ada kemungkinan membuat bangsa Indonesia terbuai untuk tidak segera mempersiapkan diri agar pada saat yang telah ditentukan siap untuk bersaing dengan tarif minimal. Mengingat cakupan produk yang masuk dalam *sensitive list* ini umumnya adalah produk yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka persiapan menuju perdagangan bebas untuk komoditi tersebut juga bersifat temporer atau sementara saja, atau dengan kata lain pelaksanaannya hanya tinggal menunggu waktu.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, misalnya menyiapkan berbagai hal agar dalam pelaksanaan *Sensitive List* ini nanti tidak akan terjadi masalah di Indonesia. Untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan penghapusan *Sensitive List* bagi komoditas *highly sensitive* bagi Indonesia tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Mulai dari infrastruktur sampai dengan regulasi yang efektif harus dipersiapkan agar tidak terjadi *shock* yang luar biasa pada saat pasar bebas hambatan untuk komoditas sensitive ini diberlakukan. Komoditas ini mempunyai arti penting karena pertanian merupakan mata pencaharian lebih dari 40% penduduk Indonesia dan beras merupakan bahan pangan utama di Indonesia.

APA SAJA YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Persiapan yang harus dilakukan Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga kategori jangka waktu, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, maka Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi skema CEPT yang dilaksanakan 2002 nanti. Persiapan yang dilakukan ini haruslah dapat mengakomodir kepentingan masing-masing pihak yang terkait dengan AFTA ini, yaitu pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja kepentingan pihak swasta, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, apabila selama ini pemerintah telah merasa siap untuk bersaing dalam AFTA padahal sektor swasta merasa masih belum siap, maka harus segera dicari solusinya. Ketidaksiapan sektor swasta ini tidak bisa dipaksakan. Karena apabila sektor swasta memaksakan diri bersaing dalam AFTA padahal belum siap, maka hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebaiknya segera

mengakomodir ketidaksiapan sektor swasta ini dengan cara memanfaatkan celah yang ada, yaitu melalui permintaan dispensasi (keringanan) bagi industri-industri tertentu yang memang belum siap masuk pasar bebas ASEAN. Namun pada saat yang sama persiapan untuk menyambut AFTA 2002 juga harus dilakukan dari semua lini.

Dalam jangka menengah, Indonesia dapat mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan efisiensi dan daya saing komoditi Indonesia yang akan masuk dalam perdagangan ASEAN. Peningkatan daya saing dan efisiensi ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan institusi/kelembagaan yang efektif, artinya institusi yang bersifat mendukung dunia usaha dan bukannya menghambat. Peningkatan daya saing juga dapat dilakukan dengan cara meniadakan berbagai *bottle neck* dalam struktur birokrasi Indonesia. Rumitnya sistem birokrasi Indonesia selama ini memang ditengarai sebagai salah satu penyebab adanya praktek KKN dan adanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang membuat produk Indonesia tidak berdaya saing. Demikian juga berbagai aturan baik pusat maupun daerah yang menghambat peningkatan daya saing perlu segera diberantas.

Dalam jangka panjang, kita harus segera mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan *sensitive list*. Hal ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan komoditi *highly sensitive* (tingkat makro) sampai dengan mempersiapkan infrastruktur sektor pertanian yang memadai (tingkat mikro).

Pengembangan *blue print* yang jelas dalam menghadapi AFTA sangat penting artinya bagi Indonesia, mengingat setelah AFTA ini kita masih menghadapi berbagai skema perdagangan bebas lainnya, yaitu perdagangan bebas global (WTO). AFTA ini pada dasarnya adalah *test case* bagi

bangsa Indonesia. Apabila bangsa Indonesia sukses dengan AFTA, maka kemungkinan besar kita juga tidak

mengalami kesulitan banyak dalam menyiapkan diri menghadapi perdagangan bebas dunia.

"Disiplin sebuah peradaban bukanlah disiplin dengan ketakutan.
Melainkan dengan kebebasan"
(Goenawan Muhamad)